

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 yang berisi tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia maka kemudian mendorong pemerintah mengambil tindakan yang disesuaikan dengan fungsi, tugas, serta kewenangan tiap-tiap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya dan memiliki daya saing yang berkualitas. Imbas dari Inpres tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat *Road Map* pengembangan SMK, selain itu juga sedang menyempurnakan dan mensinkronkan kurikulum SMK dengan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Lulusan SMK yang berdaya saing dan memiliki kemampuan kejuruan jelas merupakan tujuan pokok dari Inpres tersebut. Apalagi ditengah gencarnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang memiliki pola untuk memadukan ekonomi pada negara ASEAN dengan jalan membangun sistem perdagangan bebas atau *free trade* bagi anggotanya dan juga bebasnya pekerja untuk keluar-masuk dan bekerja di lintas negara ASEAN. Melalui lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perlu untuk merevitalisasi SMK agar mampu menjadi sebagai suatu jenjang pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Inpres tersebut mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat peta jalan sebagai pedoman dalam pengembangan SMK sekaligus menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai industri, serta mendorong SMK untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) di tiap SMK agar lulusan SMK dapat tersertifikasi dan mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan daya saing lulusan.

Dalam masyarakat saat ini, persaingan semakin ketat, dan terutama bagi lulusan sekolah kejuruan, jumlah lowongan yang dibuka perusahaan tidak

sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada, yang pada akhirnya akan menyulitkan pencari kerja mendapat pekerjaan. Lulusan sekolah kejuruan harus disambut baik oleh industri, tetapi sebaliknya industri tidak mau merekrut lulusan SMK karena kompetensi lulusan SMK tidak bisa memenuhi kebutuhan industri. (Annisa Fauzi et al., 2020).

Berdasarkan survey Agustus 2021 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kategori pendidikan, tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang angka yang paling banyak dibanding tamatan jenjang pendidikan yang lain, yaitu sejumlah 11,13 persen, untuk tamatan SMA sebesar 9,09 persen, tamatan SMP sebesar 6,45 persen, tamatan Universitas 5,98 persen, tamatan Diploma I/II/III sebesar 5,87 persen, sementara TPT yang paling kecil adalah pada tamatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu dengan angka 3,61 persen (BPS, 2021).

Kualitas lulusan SMK harus terus ditingkatkan pemerintah jika dilihat dari realita tersebut, diawali dari peningkatan jumlah dan kualitas sarana praktek siswa, diklat *retooling* guru pengajar program vokasi, sampai kepada improvisasi intensitas hubungan antara SMK dengan industri maupun dunia kerja.

Kemampuan yang dimiliki alumni SMK harus relevan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri, yang merupakan esensi dari fungsi *link and match* antara SMK dan industri. Adanya keselarasan antara kebutuhan akan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dengan ketersediaan lulusan SMK dengan keterampilan yang tepat, sehingga dapat memenuhi tuntutan keterampilan di dunia kerja (Disas, 2018). Pelatihan bagi karyawan baru seharusnya tidak diperlukan lagi bagi perusahaan yang merekrut lulusan SMK manakala mereka mengisi posisi yang selaras pada kompetensi dan jurusan yang diambil ketika menempuh jenjang SMK.

Dalam rangka melakukan evaluasi sejauh mana kompetensi yang telah dipegang oleh calon lulusan SMK yang akan menyelesaikan studinya, maka wajib bagi SMK untuk melaksanakan asesmen sertifikasi. Uji kompetensi merupakan sekumpulan proses yang dijalankan untuk

mengumpulkan bukti yang relevan dan dibandingkan dengan standar acuan yang telah ditentukan (Watson, 1994). Asesmen sertifikasi kompetensi oleh pada level SMK dilakukan pengujian tentang sejauh mana kemampuan individu melalui sisi keterampilan dan pengetahuan dengan menggunakan suatu metode observasi praktek oleh asesi/peserta asesmen secara langsung berdasarkan jurusan yang ditempuh oleh siswa tersebut. Asesmen kompetensi merupakan tuntutan bagi siswa SMK yang ingin lulus, hal tersebut disebabkan karena kompetensi adalah sebuah karakter unik yang bersifat istimewa dari pendidikan kejuruan yaitu keterampilan yang sesuai dengan kompetensi ataupun jurusannya. Penilaian asesmen sertifikasi kompetensi disesuaikan menurut SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) merupakan sebuah rumusan keterampilan kerja yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan persyaratan kerja tertentu. Dalam rangka mewujudkan kualifikasi tersebut, maka diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang menjadi referensi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta asesmen dalam kerangka sertifikasi kompetensi pada sektor/bidang pekerjaan yang spesifik (Suwarno & Ismanto, 2020). Bagi siswa lulusan SMK level jabatan yang sesuai jenjang dikemas dalam KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level II untuk jabatan operator. Dengan disejajarkannya kualitas instrumen asesmen sertifikasi kompetensi SMK dengan KKNi maka lulusan SMK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Penilaian asesmen sertifikasi kompetensi memakai instrumen yang sebelumnya sudah dibuat oleh tim asesor SMK Negeri 1 Tenganan, dan telah diverifikasi oleh industri pasangan yang selaras dengan masing-masing kompetensi keahlian dan telah dipadukan dengan SKKNI yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Level kompetensi siswa yang disesuaikan dengan KKNi tentunya juga menyesuaikan pada kompetensi keahlian yang dipilih oleh siswa di SMK. Siswa yang mengambil kompetensi keahlian otomotif tentu akan dilakukan

asesmen dengan level KKNI otomotif, siswa dengan kompetensi keahlian tata busana akan dilakukan asesmen dengan kompetensi tata busana, dan seterusnya. Berpijak dari sini siswa SMK diharap dapat menunjukkan keterampilan yang sesuai dengan kompetensinya pada saat dilakukan asesmen sertifikasi kompetensi. Sekolah umumnya menggunakan sistem cicil klaster, klaster adalah KKNI yang dipecah sesuai kelompok dan dipergunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi (BNSP, 2017).

Sertifikasi siswa SMK salah satu titik penting dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi siswa dan juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK. Selain itu sertifikasi siswa SMK dianggap perlu sebagai peningkatan kualitas dan daya saing dalam rangka menghadapi tantangan kerja global pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Asesmen Sertifikasi Kompetensi oleh LSP P1 di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perencanaan Asesmen Sertifikasi Kompetensi di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Penerapan Asesmen Sertifikasi Kompetensi di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana Tindak Lanjut Asesmen Sertifikasi Kompetensi di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Perencanaan Asesmen Sertifikasi Kompetensi di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang.
2. Mendeskripsikan Penerapan Asesmen Sertifikasi Kompetensi SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang.
3. Mendeskripsikan Tindak Lanjut Asesmen Sertifikasi Kompetensi di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

- a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi penerapan teori pengelolaan asesmen sertifikasi kompetensi terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan pendidikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dan referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi dalam rangka tata kelola asesmen sertifikasi kompetensi yang baik secara efektif, dan dapat mempengaruhi proses manajemen dan meningkatkan kualitas asesmen kompetensi itu sendiri.
- b. Bagi Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai acuan dalam pengembangan pengelolaan asesmen sertifikasi kompetensi terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Bagi Asesor, memberikan wawasan tentang pelaksanaan asesmen sertifikasi kompetensi, terkait dengan skema yang akan diujikan sesuai kompetensi keahliannya.